



EVALUASI PEMBANGUNAN KORIDOR BY PASS BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG TAHUN 2010-2030

Chairunnisya¹⁾, Ahyuni²⁾
Program Studi Geografi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Email: chairunnisyacn@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi eksisting serta mengevaluasi penggunaan lahan eksisting dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030 yang berlaku pada Koridor By Pass Kota Padang. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi eksisting Koridor By Pass di dominasi oleh kawasan industri dan kawasan perdagangan dan jasa. Hasil evaluasi antara penggunaan lahan eksisting dengan RTRW bahwa Koridor By Pass didominasi oleh kawasan yang tidak sesuai dengan luas 217,01 hektar dengan persentase 56,02%, sedangkan untuk lahan yang sesuai diperoleh seluas 170,37 hektar dengan persentase luasan 43,98%.

Kata Kunci: *Koridor, Penggunaan Lahan, Rencana Tata Ruang Wilayah*

Abstract

This research aims to provide the existing land use and evaluate the existing land use with Regional Spatial Plan in 2010-2030 in By Pass Corridor of Padang City. This research used quantitative approach. The results showed that the existing land use By Pass Corridor dominated with industrial sector and trade and services sector. The evaluation result between the existing land use with the By Pass Corridor in Padang City dominated by unsuitable land with an area 217,01 ha with percentage 56,02%, and suitable land with an area 170,37 ha with percentage 43,98%.

Keywords: *Corridor, Land Use, Regional Spatial Plan*

- 1) Mahasiswa Program Studi Geografi Universitas Negeri Padang
- 2) Dosen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan, terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat di Provinsi Sumatera Barat, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kebutuhan pergerakan penduduk yang semakin meningkat. Adanya penambahan penduduk yang terjadi mengakibatkan bertambahnya aktivitas yang dilakukan oleh semua lapisan masyarakat disetiap bidangnya. Bertambahnya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat tentunya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang baik. Selain itu penataan ruang wilayah juga sangat dibutuhkan guna keseimbangan dan keberlanjutan yang ada.

Pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 26 tentang penataan ruang yang berisi rencana tata ruang wilayah yang berlaku selama 20 tahun. Dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat dijelaskan bahwa tujuan dari penataan ruang wilayah adalah terwujudnya keterpaduan pola ruang provinsi tahun 2029 melalui pengembangan potensi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan ekosistem alam dan daya dukung wilayah secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan dari penataan ruang

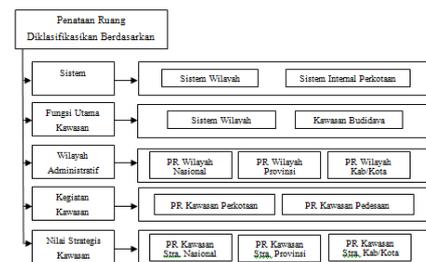
wilayah, salah satu strategi yang dilakukan pemerintah dengan pengembangan interaksi kawasan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer dan sarana pendukungnya.

Jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antarpusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Di Sumatera Barat pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah yakni penetapan pengembangan Pusat Kegiatan Nasional/PKN Kota Padang sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Padang, Pusat Kegiatan Wilayah/PKW yang terdiri dari Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Solok, dan Muara Siberut.

Kota Padang sebagai pusat kegiatan nasional, dilalui jalan by pass sebagai jalan arteri primer yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman disebelah utara dan Kabupaten Pesisir Selatan disebelah selatan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030 direncanakan pengembangan jaringan jalan, salah satunya pengembangan jalan arteri primer di jalan by pass. Jalan yang merupakan bagian dari koridor terdiri dari jalan serta pemanfaatan ruang dikanan dan kiri jalan. Koridor

merupakan sebuah lorong geografis yang secara umum mengikuti arah koneksi dari perjalanan utama yang terdiri dari jalan, jalan raya, rute transit, jalur kereta api, dan jalur perlintasan udara (Rodrigue: 2006). Koridor yang ada di Kota Padang yang merupakan jalan arteri primer adalah Koridor By Pass.

Dalam RTRW Kota Padang tahun 2010-2030, pemanfaatan ruang di Koridor By Pass Kota Padang didominasi dari sektor perdagangan dan jasa. Hal tersebut sesuai dengan fungsi koridor nasional adalah untuk pelayanan primer dalam sektor perdagangan dan jasa. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan. Pemanfaatan ruang koridor merupakan realisasi dari pemaduan perencanaan pembangunan yang bersifat ekonomi dan perencanaan keruangan. Seperti yang dikatakan Ahyuni (2011) bahwa pemaduan perencanaan pembangunan keruangan dan sistem perencanaan keruangan merupakan hal yang masih memiliki berbagai hambatan karena terdapat berbagai kesenjangan dalam hal waktu, perencanaan, materi rencana, dan prosedur implementasi pembangunan. Klasifikasi tata ruang sesuai pada skema klasifikasi penataan ruang pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema Klasifikasi Penataan Ruang

Sumber: Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Seiring dengan pembangunan jalan serta Koridor By Pass saat ini dengan ketetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang yang sudah berjalan selama 8 tahun, perlu dilakukan evaluasi berupa evaluasi pembangunan yang merupakan suatu kajian untuk mengumpulkan informasi, yang dilakukan secara sistematis melalui suatu pengukuran untuk menuju suatu sistem sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih maju. terhadap Koridor By Pass Kota Padang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030 guna kesesuaian antara aturan pembangunan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030 dengan kondisi saat ini (eksisting). Alat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) yang merupakan sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi keruangan (*spasial*) bersamaan dengan seperangkat operasi kerja (Barus dan Wiradisastira, 2000). Ciri utama data yang bisa dimanfaatkan dalam Sistem Informasi Geografi adalah data yang telah terikat dengan

lokasi dan merupakan data dasar yang belum dispesifikasi (Dulbahri, 1993).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi eksisting, serta mengevaluasi kesesuaian antara penggunaan lahan eksisting dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong pada penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan pada Koridor By Pass Kota Padang dengan waktu tiga bulan dari bulan Juli-September 2018 dengan objek penelitian kawasan koridor di by pass Kota Padang, dimana dibatasi pada satu lapisan bangunan pada kanan dan kiri jalan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Citra Quickbird Kota Padang tahun 2017 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030. Teknik

analisis data yang digunakan berupa pengukuran dan perhitungan, *overlay* peta, dan interpretasi citra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Eksisting Pembangunan Koridor By Pass Kota Padang

Koridor By Pass merupakan ruang yang terdiri dari jalan by pass yang dikategorikan sebagai jalan arteri primer, berfungsi sebagai penghubung daerah Pusat Kegiatan Nasional dengan wilayah sekitar yakni Pusat Kegiatan Wilayah. Koridor By Pass melalui beberapa kecamatan di Kota Padang, antara lain Kecamatan Koto Tengah, Kuranji, Pauh, dan Lubuk Begalung.

Koridor By Pass Kota Padang memiliki lebar jalan 16 meter dengan kondisi jalan yang baru saja mengalami pelebaran jalan dari dua ruas jalan menjadi empat ruas jalan, dan panjang lebih kurang 25,52 kilometer. Disamping kanan kiri jalan terdapat berbagai jenis penggunaan lahan yang ada sesuai pada Tabel 1.

Tabel 1. Penggunaan Lahan Eksisting Koridor By Pass Kota Padang

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan	1.73	0.45
2	Industri	135.83	35.06
3	Lahan Kosong	7.96	2.05
4	Perdagangan dan Jasa	115.24	29.75
5	Perkantoran	26.40	6.82
6	Perkebunan	1.82	0.47
7	Perumahan	35.35	9.13
8	Lainnya	0.91	0.23
9	Sarana Kesehatan	2.51	0.65
10	Sarana Pendidikan	11.25	2.90
11	Sarana Umum	1.36	0.35
12	Sawah	23.33	6.02
13	Semak Belukar	17.43	4.50
14	Sungai	2.13	0.55
15	Tegalan/Ladang	4.13	1.07
	Total	387.38	100.0

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Berdasarkan hasil dari interpretasi citra dan survei lapangan diperoleh lima belas jenis penggunaan lahan. Jenis penggunaan lahan di Koridor By Pass Kota Padang didominasi oleh sektor industri dengan luas 135,83 hektar dengan persentase 35,06%. Jenis industri yang ada di Koridor By Pass Kota Padang bervariasi, mulai dari industri karet, industri alat-alat berat, dan industri lainnya.

Selain industri, sektor perdagangan dan jasa juga

mendominasi pada kawasan Koridor By Pass Kota Padang dengan luas 115,24 hektar dengan persentase luas 29,75%. Pada perdagangan dan jasa terdapat berbagai jenis yang ada seperti rumah makan, hotel, biro perjalanan, berbagai jenis bengkel, bank, serta ruko-ruko yang terdapat di Koridor By Pass Kota Padang. Hasil dari penggunaan lahan eksisting dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan Eksisting Koridor By Pass Kota Padang
Sumber: Hasil Analisis, 2018

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030

Ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang diatur pada Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030. Dalam RTRW Kota Padang telah diatur rencana pola ruang di Koridor By Pass Kota Padang yang dapat dilihat pada Tabel 2 dan peta pada Gambar 3.

Tabel 2. Rencana Tata Ruang Wilayah di Koridor By Pass Kota Padang

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan	15.54	4.01
2	Industri	72.68	18.76
3	Perdagangan dan Jasa	189.41	48.90
4	Perkantoran	9.96	2.57
5	Perumahan	81.35	21.00
6	RTH	1.36	0.35
7	Sarana	8.95	2.31
8	Sawah	8.12	2.10
Total		387.38	100.00

Sumber: Hasil Analisis, 2018



Gambar 3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang pada Koridor By Pass Kota Padang

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Kesesuaian antara Pembangunan Koridor By Pass dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030

Untuk menentukan kesesuaian antara pembangunan Koridor By Pass Kota Padang dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030, dilakukan evaluasi dengan melakukan *overlay* antara penggunaan lahan eksisting Koridor By Pass dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030. Hasil evaluasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kesesuaian Penggunaan Lahan Eksisting dengan RTRW Kota Padang

No	Sesuai/ Tidak Sesuai	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sesuai	170.37	43.98
2	Tidak Sesuai	217.01	56.02
Jumlah		387.38	100

Sumber: Hasil Analisis, 2018

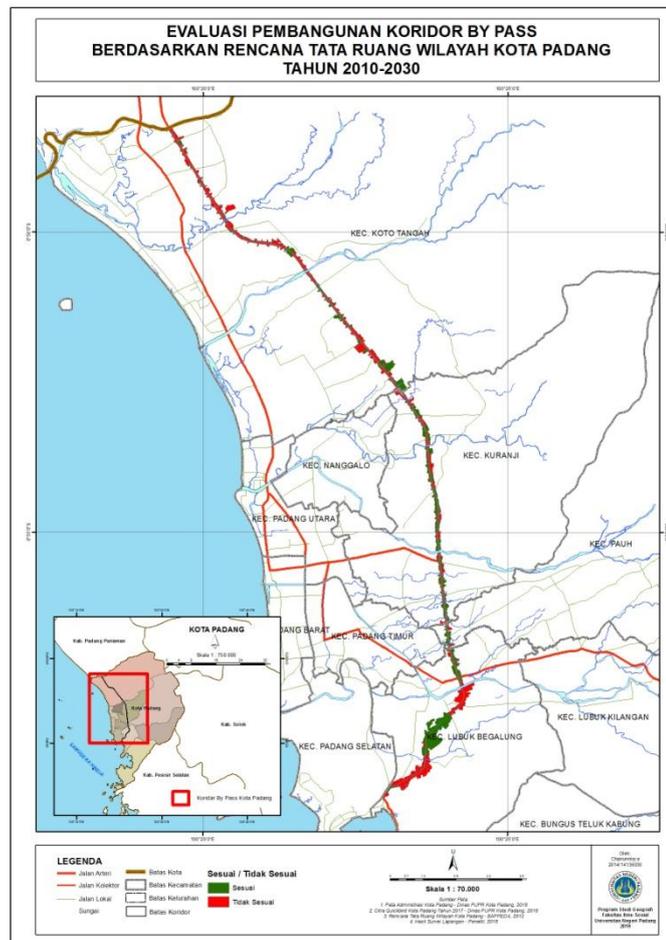
Dari hasil evaluasi, kesesuaian antara Koridor By Pass Kota Padang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2010-2030 didominasi oleh lahan yang tidak sesuai dengan RTRW dengan luas 217,01 ha dengan persentase 56,02% dari luas lahan pada Koridor By Pass Kota Padang. Sedangkan untuk lahan sesuai dengan luas 170,37 ha dengan persentase 43,98%.

Kawasan yang tidak sesuai didominasi oleh kawasan perdagangan dan jasa yang pada RTRW merupakan kawasan yang paling luas, berada pada kawasan AiePacah, dan juga pada kawasan menuju Teluk Bayur yang ditetapkan mayoritas menjadi kawasan perumahan, namun kenyataannya

disana didominasi oleh kawasan industri.

Kawasan yang sesuai antara lain kawasan perkantoran yaitu Kantor Walikota Padang yang telah direncanakan untuk pusat pemerintahan Kota Padang perubahan pasca gempa 2009. Selain itu, Universitas Baiturrahmah sebagai kawasan sarana pendidikan, serta ruko-ruko sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang berada pada kanan-kiri jalan By Pass Kota Padang.

Hasil evaluasi berupa peta evaluasi pembangunan Koridor By Pass Kota Padang dengan RTRW Kota Padang tahun 2010-2030 dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Evaluasi Pembangunan Koridor By Pass Kota Padang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030
Sumber: Hasil Analisis, 2018

PENUTUP

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi eksisting Koridor By Pass Kota Padang memiliki lebar jalan 16 meter dengan panjang 25,52 km. Dari segi penggunaan lahan eksisting, didominasi oleh kawasan industri, dengan luas 135,83 hektar dengan persentase 35,06% diikuti oleh kawasan perdagangan dan jasa seluas 115,24 hektar dengan persentase luas 29,75%.
2. Dalam pembangunan Koridor By Pass Kota Padang, salah satu aturan pembangunan yang berlaku adalah Rencanan Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030 yang didominasi oleh kawasan perdagangan dan jasa.
3. Dari hasil evaluasi, kesesuaian antara Koridor By Pass Kota Padang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030 didominasi oleh lahan yang tidak sesuai dengan

RTRW seluas 217,01 hektar dengan persentase 56,02% dari luas lahan pada Koridor By Pass Kota Padang. Sedangkan untuk lahan yang sesuai dengan RTRW seluas 170,37 ha dengan persentase 43,98%.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyuni. 2011. “Pepaduan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Keruangan” *Jurnal Tingkap* Vol. VII No. 2 Tahun 2011: 133-145.
(<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/tingkap/article/viewFile/20/18>)
- Barus, B., dan Wiradisastra U. S. 2000 *Sistem Informasi Geografi, Sarana Manajemen Sumberdaya*. Bogor: Laboratorium Penginderaan Jauh dan Kartografi, Fakultas Pertanian, IPB.
- Dulbahri. 1993. *Sistem Informasi Geografi*. Yogyakarta: Fakultas Geografi. Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032.
- Peraturan Walikota Padang No. 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang tahun 2010-2030.
- Rodrigue, Jean-Paul., Comtois, Claude., dan Slack, Brian. 2006. *The Geography of Transport Systems*. Taylor & Francis e-Library: Amerika dan Kanada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.